

**EFISIENSI SEKTOR PUBLIK
DAN KINERJA EKONOMI DAERAH
(Studi Kasus Kabupaten/Kota Di Jawa Timur)**

JURNAL ILMIAH

Disusun oleh :

**Saidatul Chusnah
105020113111007**



**JURUSAN ILMU EKONOMI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
MALANG
2014**

LEMBAR PENGESAHAN PENULISAN ARTIKEL JURNAL

Artikel Jurnal dengan judul :

**EFISIENSI SEKTOR PUBLIK
DAN KINERJA EKONOMI DAERAH
(Studi Kasus Kabupaten/Kota Di Jawa Timur)**

Yang disusun oleh :

Nama : Saidatul Chusnah
NIM : 105020113111007
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Jurusan : S1 Ilmu Ekonomi

Bahwa artikel Jurnal tersebut dibuat sebagai *persyaratan ujian skripsi* yang dipertahankan di depan Dewan Penguji pada tanggal 27 Juni 2014

Malang, 27 Juni 2014

Dosen Pembimbing,



Ferry Prasetya, SE., M. APP. Ec. Int

NIP.19801228 200501 1 002

EFISIENSI SEKTOR PUBLIK DAN KINERJA EKONOMI DAERAH

(Studi Kasus Kabupaten/Kota di Jawa Timur)

Saidatul Chusnah

Ferry Prasetya, SE., M. APP. Ec. Int

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya

Email: chusnah28@yahoo.com

ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis tentang efisiensi sektor publik dan pengaruhnya efisiensi sektor publik terhadap kinerja ekonomi daerah pada 38 kabupaten/kota di Jawa Timur selama periode tahun 2010 dan 2012. Pada tahap pertama Penelitian ini menggunakan alat analisis Data Envelopment Analysis (DEA) yang merupakan metode pengukuran efisiensi dengan menggunakan pendekatan non-parametrik. Sedangkan pada tahap kedua peneliti menggunakan alat analisis panel data, yang terdiri dari data times series selama periode 2010 dan 2012 dan data cross section 38 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur. Salah satu pendekatan yang digunakan untuk mengestimasi model regresi data panel adalah dengan menggunakan fixed effect model (FEM). Alat analisis ini digunakan untuk menentukan pengaruh efisiensi sektor publik terhadap kinerja ekonomi daerah.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengeluaran publik sebagian besar tidak efisien. Variabel efisiensi sektor publik secara langsung tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi namun secara tidak langsung berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi, sedangkan Variabel efisiensi sektor publik berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan kecuali variabel infrastruktur yang tidak signifikan terhadap kemiskinan.

Kata kunci: Efisiensi sektor publik, kinerja ekonomi daerah, Data Envelopment Analysis (DEA), Fixed Effect Model (FEM).

A. PENDAHULUAN

Terdapat beberapa studi yang telah meneliti tentang desentralisasi diantaranya adalah Oates (1993); Utomo dan Sumarsono (2009); Sasana (2006); dan Simanjuntak (2005). Studi ini fokus pada desentralisasi, pertumbuhan ekonomi, dan kesejahteraan. Menurut Simanjuntak (2005) dalam penemuannya mengatakan bahwa dana transfer pada program desentralisasi fiskal berupa dana *block grant* akan memberikan pengaruh yang lebih efisien terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat dibandingkan dengan dana transfer berupa *specific grant*. Berbeda lagi dengan hasil penemuan dari Oates (1993); Utomo dan Sumarsono (2009); dan Sasana (2006) yang mengatakan bahwa desentralisasi fiskal akan mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, karena Pemerintah Daerah akan lebih efisien dalam produksi dan penyediaan barang-barang publik.

Desentralisasi dapat dikatakan sebagai suatu alat untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efisien dan partisipatif (Tanzi, 2002). Tujuan diterapkannya desentralisasi fiskal adalah untuk mendekatkan pemerintah dengan rakyatnya, dimana pemerintah dapat bekerja dengan lebih baik (efisien) (Rasyid, 2005). Sehingga adanya instrument desentralisasi ini diharapkan dapat memberikan dampak bagi belanja pemerintah yaitu berupa peningkatan efisiensi pengeluaran sektor publik. Adanya desentralisasi fiskal ini pemerintah daerah diharapkan dapat bijak dalam melakukan peranannya untuk melakukan pengeluaran daerah yang seefisien mungkin dan dapat memberikan pelayanan bagi masyarakat di mulai dari pelayanan yang paling sederhana seperti dalam bidang pendidikan, kesehatan dan infrastruktur. Dalam menciptakan sumberdaya manusia yang berkualitas yang memiliki peran yang sangat penting adalah kesehatan, pendidikan dan infrastruktur (Christiana, 2012).

Besarnya komitmen pemerintah dalam membangun kualitas manusia melalui pengeluaran daerah tampak dari alokasi pengeluaran belanja daerah pada sektor pendidikan, kesehatan dan infrastruktur tersebut (Christiana, 2012). Sehingga dapat dikatakan, seberapa besar pengaruh setiap dana yang dibelanjakan untuk mencapai sasaran pembangunan menjadi suatu permasalahan penting dalam alokasi pengeluaran pemerintah. Dapat dilihat dari peran pemerintah dalam rangka menciptakan pembangunan ekonomi dan kualitas hidup masyarakat pemerintah senantiasa meningkatkan upaya dengan melakukan pengeluaran disektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur yang selalu meningkat setiap tahun nya.

Alokasi anggaran belanja pendidikan dan kesehatan di provinsi Jawa Timur merupakan alokasi yang terbesar jika dibandingkan dengan beberapa provinsi lain di Indonesia. Dengan adanya input yang tinggi seharusnya dihasilkan output yang besar agar suatu efisiensi dapat tercapai. Belanja yang tinggi seharusnya diimbangi dengan pelayanan masyarakat yang semakin baik seperti kemudahan dalam mengakses layanan umum. Namun pada

kenyataannya Jika dilihat dari anggaran belanja kesehatan Jawa Timur lebih besar dari propinsi Jawa tengah dan Jawa Barat namun jumlah output yang ada di Jawa Timur tidak sebesar jumlah output yang ada di kedua propinsi tersebut.

Pengeluaran pemerintah yang selalu meningkat setiap tahun nya belum tentu diikuti dengan penggunaan yang semakin efisien. Efisiensi ini diartikan sebagai usaha untuk mengoptimalkan pengeluaran sektor publik dalam upaya mencapai pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Hasil dari kinerja pemerintah daerah di Jawa Timur dalam rangka melakukan pengeluaran publik masih belum begitu memuaskan karena mengingat masih banyak nya jumlah masyarakat miskin dan masih rendahnya tingkat indek pembangunan manusia. Pengeluaran pemerintah yang selalu meningkat tidak selalu menunjukkan kesuksesan kinerja pemerintah dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat nya. Salah satu faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi adalah pengeluaran pemerintah serta kinerja ekonomi daerah. Sehingga diharapkan dengan adanya efisiensi pengeluaran pemerintah bisa menyongkong dalam perekonomian daerah sehingga mampu mempengaruhi tingkat kesejahteraan masyarakat. Hal inilah yang akan dikaji lebih dalam dalam penelitian ini, yaitu tentang pengaruh efisiensi sektor publik terhadap kinerja ekonomi.

B. TINJAUAN PUSTAKA

Pengukuran Efisiensi Sektor Publik

Dalam penyediaan layanan publik perlu adanya efisiensi. Maksud dari efisiensi layanan publik tersebut adalah bagaimana suatu pemerintah daerah tersebut dapat menggunakan keuangan daerah secara akurat dan optimal untuk menghasilkan sejumlah output atau layanan publik. Disediakannya sektor publik yaitu dengan tujuan untuk menghasilkan pelayanan terbaik kepada masyarakat dengan menggunakan sumber daya yang dimiliki. Kinerja sektor publik sendiri dilihat dengan tolak ukur berapa banyak pelayanan yang diberikan dan disediakan untuk masyarakat serta bagaimana kualitas dari pelayanan yang disediakan.

Sedangkan untuk mengukur tingkat efisiensi digunakan metode pengukuran efisiensi dengan menggunakan pendekatan nonparametric yaitu DEA. Data Envelopment Analisis (DEA) merupakan sala satu metode untuk mengukur efisiensi, yang pertama kali di perkenalkan oleh Farrell (1957) dan di populerkan oleh Charnes, Cooper dan Rhodes (1978), mengasumsikan adanya perbatasan pada kurva produksi (dalam Merini, 2013). Analisis ini dapat menghasilkan urutan skor efisiensi unit kegiatan ekonomi. Angka efisiensi yang dihasilkan merupakan perbandingan kinerja suatu unit kegiatan ekonomi (UKE) dengan kurva batas kemungkinan produksinya (*production possibility frontier*), oleh karena itu skor efisiensi unit kegiatan ekonomi tersebut relatif terhadap kinerja kemungkinan terbaiknya. Metode pengukuran efisiensi dengan pendekatan non-parametrik khususnya DEA dapat digunakan untuk mengukur efisiensi teknis unit kegiatan ekonomi secara relatif dengan menggunakan banyak input dan banyak output (Hermawan, 2013).

Efisiensi Sektor Publik Terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Untuk memacu pertumbuhan ekonomi, dibutuhkan investasi baru yang merupakan tambahan neto atau stok modal (*capital stock*). Adapun asumsi yang digunakan dalam teori ini adalah dimana diasumsikan terdapat hubungan ekonomi langsung antara besarnya total stok modal (K), dengan GNP total (Y). setiap tambahan neto terhadap stok dalam bentuk investasi baru akan menghasilkan kenaikan arus output nasional atau GNP (Todaro, 2006).

$$\frac{\Delta Y}{Y} = \frac{s}{k}$$

Persamaan tersebut merupakan bentuk sederhana dari teori pertumbuhan Harrod-Domar. Jadi berdasarkan teori Harrod-Domar agar dapat tumbuh dengan pesat, maka setiap perekonomian harus menabung dan menginvestasikan sebanyak mungkin GNP-nya. Akan tetapi tingkat pertumbuhan aktiva yang dapat dijangkau pada tiap tingkat tabungan dan investasi juga bergantung pada produktivitas investasi tersebut.

Selain dari teori pertumbuhan Harrod-Domar juga terdapat teori dalam teori Solow yang menjelaskan bahwa investasi dan tabungan, pertumbuhan penduduk serta teknologi berpengaruh terhadap tingkat output perekonomian dan pertumbuhannya. Berdasarkan pengkajian yang dilakukan solow mengatakan dengan bertambahnya tabungan, modal yang tersedia untuk berinvestasi akan semakin besar sehingga akan mempercepat pertumbuhan ekonomi. Model dasar dari pertumbuhan solow adalah sebagai berikut:

$$Y = F(KL)$$

Dimana Y adalah output, K adalah modal fisik, dan L adalah angkatan kerja. Inti dari model solow ini adalah menerangkan tentang Besarnya investasi per pekerja adalah fungsi dari capital stock per pekerja. Besar kecil nya capital stock dipengaruhi oleh investasi serta depresiasi atau penyusutan. Ketika investasi naik maka capital stock akan bertambah dan sebaliknya. Tingkat tabungan yang tinggi akan berpengaruh terhadap bertambahnya capital

stock. Pertambahan ini yang selanjutnya akan berpengaruh terhadap pendapatan yang bisa mendorong terjadinya pertumbuhan ekonomi yang cepat.

Sebagian besar studi mengenai hubungan antara pengeluaran pemerintah dan pertumbuhan ekonomi berasumsi bahwa implikasi semua pengeluaran investasi pemerintah adalah produktif (Barro, 1990; Grossman, 1988; dan fan, et.all, 2004). Sebagaimana Grossman (1988) menemukan hubungan positif antara pengeluaran pemerintah dan pertumbuhan ekonomi, tanpa melihat pengeluaran per sector (*regardless of the disaggregation of expenditures*). Begitu juga dengan fan, et.all (2004) dalam penelitian yang dilakukan oleh fan menunjukkan bahwa investasi pemerintah pada sektor pertanian, pendidikan, dan infrastruktur memiliki pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi dan penurunan kemiskinan. Fan mengatakan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi dan pengurangan tingkat kemiskinan pemerintah perlu memberikan prioritas terhadap sektor pertanian, pendidikan, dan jalan infrastruktur.

Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Hal Greiner (2006) dan Barro (1990). Greiner (2006) mengatakan bahwa tidak ada pertumbuhan ekonomi saat investasi pemerintah tidak optimal. Untuk itu investasi pada pembangunan modal manusia akan dapat mendukung pertumbuhan ekonomi jika dilakukan dengan efektif dan efisien.

Efisiensi Sektor Publik Terhadap Tingkat Kemiskinan

Teori pertumbuhan baru menekankan pentingnya peranan pemerintah terutama dalam meningkatkan pembangunan modal manusia (*human capital*) dan mendorong penelitian serta pengembangan untuk meningkatkan produktivitas manusia. Kenyataannya dapat dilihat dengan melakukan investasi pendidikan akan mampu meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang diperlihatkan dengan meningkatnya pengetahuan dan keterampilan seseorang. Semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang, maka pengetahuan dan keahlian juga akan meningkat sehingga akan mendorong peningkatan produktivitas kerjanya. Rendahnya produktivitas tingkat kemiskinan dapat disebabkan oleh rendahnya akses mereka untuk memperoleh pendidikan (Sitepu dan Sinaga, 2005).

Tidak hanya pendidikan yang merupakan determinan penting dalam tingkat kemiskinan, namun kesehatan dan infrastruktur juga merupakan determinan penting dalam tingkat kemiskinan. Akses terhadap pelayanan kesehatan merupakan tanggung jawab yang harus diberikan oleh pemerintah terhadap masyarakatnya. Kesehatan merupakan standar hidup minimum yang harus dimiliki oleh setiap masyarakat. Kesehatan masyarakat yang cenderung baik akan berdampak pada produktivitas dan etos kerja yang meningkat pula, alhasil pendapatan yang dihasilkan meningkat seiring dengan perbaikan kesehatan di masyarakat. Pendapatan baik secara individu maupun agregat akan bertambah. Pendapatan yang meningkat akan mengangkat derajat seseorang untuk keluar dari kemiskinan.

Sama halnya di sektor infrastruktur juga merupakan salasatu peranan penting dalam tingkat kemiskinan. Dimana infrastruktur merupakan roda penggerak pertumbuhan ekonomi. Fasilitas transportasi memungkinkan orang, barang, dan jasa yang diangkut dari satu tempat ke tempat yang lain di seluruh penjuru dunia. Perannya sangat penting baik dalam proses produksi maupun dalam menunjang distribusi komoditi ekonomi. Telekomunikasi, listrik, dan air merupakan elemen yang sangat penting dalam proses produksi dari sektor-sektor ekonomi seperti perdagangan, industri dan pertanian. Keberadaan infrastruktur akan mendorong terjadinya peningkatan produktivitas bagi faktor-faktor produksi.

Perbaikan infrastruktur akan meningkatkan penyerapan tenaga kerja, memicu investasi dan peningkatan pendapatan masyarakat. Infrastruktur yang baik juga merangsang peningkatan pendapatan masyarakat. Aktivitas ekonomi yang semakin meningkatkan mendorong mobilitas faktor produksi dan aktivitas perdagangan. Pada akhirnya perbaikan infrastruktur ini akan mempercepat pembangunan ekonomi. Meningkatnya kondisi pembangunan akan memberikan efek peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pengentasan kemiskinan. Maka dari itu perlu dilakukan suatu kajian tentang dampak pembangunan infrastruktur terhadap pengentasan kemiskinan.

Ada beberapa penelitian yang mengukur tentang pengaruh sektor publik terhadap kemiskinan diantaranya adalah (Siregar dan Wahyuniarti, 2008; Lincoln, 1999; Mehmood dan Sadiq, 2010; dan Samsubar, 2002). Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa pengeluaran pemerintah dan kemiskinan memiliki pengaruh signifikan terhadap kemiskinan. Lincoln, 1999 dan Samsubar, 2002 dalam penelitiannya mengatakan intervensi untuk memperbaiki kesehatan dari pemerintah juga merupakan suatu alat kebijakan penting untuk mengurangi kemiskinan. Salah satu faktor yang mendasari kebijakan ini adalah perbaikan kesehatan akan meningkatkan produktivitas golongan miskin. Kesehatan yang lebih baik akan meningkatkan daya kerja, mengurangi hari tidak bekerja dan menaikkan output energi. berbeda Samsubar menfokuskannya pada pengeluaran pemerintah untuk investasi sumber daya manusia dan pengeluaran pemerintah untuk sumber daya fisik perkapita per propinsi sebagai faktor penentu tingkat kemiskinan.

C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini mengambil studi pada 38 kabupaten/kota di Jawa Timur dengan menggunakan data runtut waktu (*time series*) dan data *cross section*. Data runtut waktu mencakup tahun 2010 dan 2012 untuk indikator kinerja sektor publik. Dalam penelitian ini tahapan metode yang dilakukan adalah pertama mengukur tingkat efisiensi sektor publik dengan menggunakan metode *Data Envelopment Analysis* (DEA). Setelah dihasilkan skor efisiensi sektor publik maka langkah kedua adalah untuk mengetahui pengaruh efisiensi sektor publik terhadap kinerja ekonomi daerah dengan menggunakan Regresi data panel.

Data Envelopment Analysis (DEA)

DEA merupakan metode pengukuran efisiensi dengan menggunakan pendekatan nonparametric yang menggunakan teknik *linear programming* (Merini, 2013). Selain itu DEA juga merupakan prosedur yang didesain secara khusus untuk mengukur efisiensi suatu Unit Kegiatan Ekonomi (UKE) atau Decision Making Unit (DMU) yang menggunakan banyak input dan banyak output, dimana penggunaan input dan output tersebut tidak mungkin dilakukan (Cristiana, 2012). Dalam metode DEA, pengukuran dasar efisiensi adalah sebagai berikut:

$$\text{Efisiensi} = \frac{\text{Output}}{\text{Input}} = \frac{\text{Virtual Output}}{\text{Virtual Input}} = \frac{\sum_{r=1}^s U_r y_r}{\sum_{i=1}^m V_i x_i}$$

Atau bisa ditulis dengan

$$\frac{U_1 Y_1 + U_2 Y_2 + \dots + U_s Y_s}{V_1 X_1 + V_2 X_2 + \dots + V_m X_m} \quad (\text{cooper et all, 2000, dalam Christiana, 2012})$$

Diman y_r = jumlah output r

U_r = bobot tertimbang dari output r

X_i = jumlah output i

V_i = bobot tertimbang dari output i

Efisiensi relative DMU didefinisikan sebagai ratio dari total output tertimbang dibagi total input tertimbangnya. Efisiensi disini juga dikatakan sebagai virtual input dan virtual output yang berarti jumlah keseluruhan input dan output. Inti dari DEA adalah menentukan bobot setiap input dan output DMU. Nilai efisiensi yang diperoleh dari pengukuran DEA berkisar antara 0-100 persen. Nilai 100 menunjukkan bahwa pengeluaran publik yang dilakukan bersifat efisien, namun jika kurang dari 100 persen, maka pengeluaran persektor yang dilakukan tidak efisien.

Regresi Panel

Data panel adalah data yang diperoleh dengan menggabungkan antara data *cross-section* dan data *time series*. Data *cross-section* dalam penelitian ini adalah data dari 38 kabupaten/kota di Jawa Timur. Sedangkan data *time series* dalam penelitian ini adalah 5 tahun di mulai dari tahun 2008 sampai dengan 2012. Dalam penelitian ini, untuk mengetahui pengaruh efisiensi sektor publik terhadap kinerja ekonomi daerah maka model penelitian yang akan diestimasi adalah:

$$Y_{it} = \alpha_{it} + \beta_1 X1_{it} + \beta_2 X2_{it} + \beta_3 X3_{it} + \epsilon_{it}$$

Sedangkan teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan statistik regresi untuk data panel. Dalam analisis data panel terdapat tiga model utama, yaitu model *Pooled Least Square*, model efek tetap (*fixed effect*), dan terakhir model efek acak (*random effect*).

Pooled Least Square

Pendekatan kuadrat terkecil adalah pendekatan paling sederhana dalam pengolahan data yang diterapkan dalam data berbentuk panel. Asumsi dalam model ini adalah intersep maupun slope sama antar unit lintas dan waktu. Sedangkan untuk pendugaan parameter model kuadrat terkecil digunakan metode *Ordinary Least Square* (OLS).

Pendekatan Fixed Effect

Selain estimasi dengan pendekatan Pooled Least Square, estimasi data panel lainnya adalah estimasi dengan menggunakan pendekatan fixed effect. Metode ini menambahkan model *dummy* pada data panel. Pendekatan fixed effect ini memperhitungkan kemungkinan bahwa peneliti menghadapi masalah *omitted variables*, yang mungkin membawa perubahan pada *intercept* runtun waktu atau antar ruang. Model dengan fixed effect menambahkan variabel *dummy* untuk mengizinkan adanya perubahan *intercept*

Pendekatan Random Effect

Permasalahan yang terdapat pada pemodelan dengan *fixed effect* sebenarnya dapat diatasi dengan pendekatan data panel selanjutnya yaitu dengan pendekatan *random effect*. Pada model *random effect*, parameter yang berbeda antara

cross section dan *time series* dimasukkan dalam *error*. Sehingga model *random effect* sering disebut dengan model *Error Corection Model* atau ECM. Penggunaan model *random effect* akan menghemat pemakaian derajat kebebasan dan tidak mengurangi jumlahnya seperti yang dilakukan pada model *fixes effect*, sehingga hasil estimasi dengan menggunakan model *random effect* akan semakin efisien.

Pemilihan Model

Dalam pengolahan data dengan menggunakan data panel terdapat beberapa tahap pengujian yang bertujuan untuk menentukan model terbaik yang digunakan dalam sebuah penelitian data panel. Terdapat 2 tahap pengujian pemilihan model pada data panel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu , yaitu Uji Chow dan Uji Hasuman.

Pengujian Asumsi Klasik

Menurut Nachrowi (2006) dalam menganalisis regresi memerlukan dipenuhinya berbagai asumsi agar model dapat digunakan sebagai alat prediksi yang baik. Namun tidak jarang dari asumsi yang digunakan terjadi masalah dalam modelnya. Berbagai masalah yang sering dijumpai dalam analisis regresi adalah Heteroskedasitas, dan autokorelasi. Namun untuk teknik estimasi model data panel, tidak membutuhkan asumsi terbesarnya model serial korelasi, sehingga uji tentang autokolerasi dapat diabaikan (Nachrowi, 2006). Sedangkan pengujian heroskedastisitas masih tetap perlu untuk dilakukan, karena data panel juga merupakan data *cross section* yang memungkinkan terjadinya heteroskedasititas.

Kriteria Statistik

Untuk memperoleh model regresi yang terbaik atau BLUE (*Best Linier Unbiased Estimator*), beberapa kriteria haruslah dapat dipenuhi, yaitu uji R^2 , uji F, dan uji t (Nachrowi, 2006). Kriteria dalam menguji hipotesis secara statistik di dalam analisis regresi berganda penelitian ini dilakukan melalui pendekatan uji signifikan (*significant test*).

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Nilai Efisiensi Kabupaten/Kota di Jawa Timur

Teknik analisis data yang digunakan untuk menjawab rumusan masalah pertama dalam penelitian ini adalah menggunakan metode *Data Envelopment Analysis* (DEA). Dari hasil perhitungan menggunakan EMS diperoleh tingkat efisiensi kabupaten/kota dalam menyelenggarakan pengeluaran publik tahun 2008 dan 2012 disetiap sektor adalah sebagai berikut:

Tabel 1: Wilayah yang Efisiensi pada Belanja Sektor Pendidikan, Kesehatan, dan Infrastruktur

Tahun	Score	Efisiensi	Kabupaten/Kota
Egisiensi Pendidikan			
2010	100%	Efisien	Kota Surabaya
2012	100%	Efisien	Kabupaten Malang, Kota Pasuruan
Efisiensi Kesehatan			
2010	100%	Efisien	Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Pacitan, dan Kabupaten Probolinggo
2012	100%	Efisien	Kabupaten Banyuwangi, Kota Batu
Efisiensi Infrastruktur			
2010	100%	Efisien	Kabupaten Pasuruan
2012	100%	Efisien	Kota Probolinggo

Sumber: hasil olahan 2014

Hasil pengujian dengan EMS menunjukkan bahwa ternyata selama tahun 2010 dan 2012 sebagian besar kinerja pemerintah daerah di Jawa Timur tidak efisien dalam rangka menggunakan belanja dalam bidang pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Pada tahun 2010 untuk pengeluaran pada sektor pendidikan terdapat 7 wilayah yang pengeluarannya jauh diatas rata-rata namun tingkat efisiensinya sangat rendah. Wilayah yang dimaksud adalah Kabupaten Blitar pengeluarannya pada sektor pendidikan adalah sebesar 590.956 juta rupiah dengan tingkat efisiensi sebesar 0.10%, Kabupaten Magetan pengeluarannya adalah sebesar 444.191 juta rupiah dengan tingkat efisiensi hanya sebesar 0.08%, Kabupaten Ponorogo pengeluarannya adalah sebesar 493.654 juta rupiah dengan tingkat efisiensi hanya sebesar 0.10%, Kabupaten Nganjuk sebesar 546.843 juta rupiah dengan tingkat efisiensi

hanya sebesar 0.10%, Kabupaten Kediri sebesar 581.739 juta rupiah dengan tingkat efisiensi sebesar 0.11%, Kabupaten Pasuruan pengeluarannya adalah sebesar 546.892 juta rupiah dengan tingkat efisiensi hanya sebesar 0.12% dan Kabupaten Jember pengeluarannya sebesar 740.981 juta rupiah dengan tingkat efisiensi sebesar 0.14%.

Sedangkan pada tahun 2012 untuk pengeluaran pada sektor pendidikan terdapat 3 wilayah yang pengeluarannya jauh diatas rata-rata namun tingkat efisiensinya rendah. Wilayah yang dimaksud adalah Kabupaten Trenggalek, Kabupaten Blitar, dan Kabupaten Kediri. Dimana Kabupaten Trenggalek pengeluarannya pada sektor pendidikan adalah sebesar 539.296 juta rupiah dengan score efisiensi yang diperoleh sebesar 49.23%, Kabupaten Blitar sebesar 765.893 juta rupiah dengan score efisiensi yang diperoleh sebesar 53.66%, dan Kabupaten Kediri pengeluarannya sebesar 754.942 juta rupiah dengan score efisiensi sebesar 59.79%. Pengeluaran yang besar tidak disertai dengan output yang dihasilkan. Hasil itu ditunjukkan dengan anggaran pemerintah yang setiap tahunnya mengalami peningkatan namun bisa dilihat bahwa jumlah output yaitu jumlah sekolah mengalami penurunan seperti salah satunya yang ada pada kabupaten Pacitan.

Hampir sama dengan belanja pemerintah di bidang pendidikan, sebagian besar ada 35 wilayah di provinsi Jawa Timur juga tidak efisien mencapai 100% dalam melakukan belanja pemerintah di bidang kesehatan pada tahun 2010. Pada tahun 2010 untuk pengeluaran di bidang kesehatan terdapat 4 wilayah yang belanjanya jauh diatas rata-rata namun tingkat efisiensinya sangat rendah. Wilayah yang dimaksud adalah Kota Blitar pengeluarannya pada sektor kesehatan adalah 89.772 juta rupiah dengan score efisiensi hanya sebesar 12.22%, Kota Mojokerto sebesar 99.335 juta rupiah dengan score efisiensi sebesar 14.78%, Kota Kediri sebesar 153.993 juta rupiah dengan score efisiensi sebesar 17.74%, dan Kota Surabaya pengeluarannya sebesar 308.163 juta rupiah dengan score efisiensi yang diperoleh sebesar 45.13%. Hampir sama dengan tahun 2010, pada tahun 2012 wilayah yang pengeluaran di bidang kesehatan jauh diatas rata-rata namun tingkat efisiensinya sangat rendah adalah Kota Mojokerto, Kota Blitar, Kota Kediri, Kabupaten Sidoarjo, dan Kota Surabaya.

Untuk belanja infrastruktur wilayah yang tidak efisien dalam melakukan pembelanjaannya paling banyak daripada belanja di bidang lainnya. Belanja dibidang infrastruktur ini terdapat 36 wilayah di provinsi Jawa Timur yang tidak efisien dalam melakukan pembelanjaannya pada tahun 2012. Beberapa wilayah yang porsi belanja infrastrukturnya diatas rata-rata namun kinerjanya tidak pernah efisien bahkan memiliki score efisiensi yang sangat rendah adalah Kabupaten Gresik, Kota Batu, Kota Mojokerto, Kota Pasuruan, dan Kota Surabaya. Dimana Kabupaten Gresik pengeluarannya pada sektor infrastruktur adalah sebesar 160.906 juta rupiah dengan score efisiensi hanya sebesar 3.17%. Kota Batu pengeluarannya adalah 86.447 juta rupiah dengan score efisiensi sebesar 4.39%. Kota Mojokerto 35.237 juta rupiah dengan score efisiensi sebesar 6.45%. Kota Pasuruan sebesar 31.184 juta rupiah dengan score efisiensi sebesar 6.51%. Kota Surabaya sebesar 654.821 juta rupiah dengan score efisiensi sebesar 10.36%. dan Kota Kediri pengeluarannya pada sektor infrastruktur adalah 87.734 juta rupiah dengan score efisiensi hanya sebesar 9.79%.

Perbedaan tingkat efisiensi pada masing-masing wilayah berdasarkan metode analisis DEA pada setiap tahunnya untuk mendapatkan tingkat efisiensi 100%, maka setiap wilayah harus melakukan *potential improvement* pada input ataupun output. Perbaikan yang dapat dilakukan yaitu pada sisi input bisa dilakukan dengan cara mengurangi jumlah pengeluaran pada setiap urusan. Sedangkan perbaikan dari sisi output bisa dilakukan dengan mengurangi jumlah program yang tidak diperlukan (dengan meningkatkan efisiensi alokasi pengeluaran), maksudnya dengan mengalokasikan pengeluaran sektor publik untuk mencapai tingkat output yang efisien.

Dari paparan diatas dapat ditarik implikasi penelitian yang bisa dilakukan pemerintah daerah untuk mencapai tingkat efisiensi yaitu pemerintah daerah harus mengidentifikasi darimana hasil inefisiensi tersebut dapat terjadi. Hal ini bisa dilakukan dengan melihat tingkat *potential improvement* pada masing-masing wilayah, diperlukan penambahan ataukah pengurangan terhadap variabel input dan output yang ada.

Pengaruh Efisiensi Sektor Publik Terhadap Kinerja Ekonomi Daerah

Seperti yang telah dikemukakan sebelumnya, tujuan dari analisis ini adalah untuk menguji apakah terdapat pengaruh efisiensi pengeluaran sektor publik terhadap kinerja ekonomi daerah. Dalam model ini, langkah yang harus dilakukan adalah melakukan uji Husman untuk memilih antara *Fixed Effect Model (FEM)* dengan *Random Effect Model (REM)*. Dalam melakukan pengolahan data, pengukuran regresi dilakukan dengan bantuan aplikasi Eviews 7.

Pemilihan Model Estimasi

Terdapat 2 tahap pengujian pemilihan model pada data panel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu , yaitu Uji Chow dan Uji Hasuman. Uji Chow dilakukan untuk pemilihan model terbaik yang akan digunakan antara model *Pooled Least Square* dan model *fixed effect*. Jika pada tahap pengujian uji chow telah menentukan model *fixed effect*

sebagai model terbaik untuk di analisis, maka tahap selanjut nya dilakukan pengujian terhadap model *fixed effect* dan model *random effect* dengan uji hausman.

Tabel 2: **Pemilihan Estimasi Model**

Variabel Dependen	Model1 (Uji Chow)	Model 2 (Uji Hausman)
Pertumbuhan (Y_1)	Prob = 0.0183 $\alpha = 0.05$ R-squared = 0.597285 (Prob < α)	Prob = 0.7861 $\alpha = 0.05$ R-squared = 0.150712 (Prob > α)
Kemiskinan (Y_2)	Prob = 0.0000 $\alpha = 0.05$ R-squared = 0.986230 (Prob < α)	Prob = 0.0005 $\alpha = 0.05$ R-squared = 0.333151 (Prob < α)

Sumber: Hasil Perhitungan Eviews

Dari hasil perhitungan melalui *uji chow* pada variabel pertumbuhan nilai probabilitas nya lebih kecil dari 0.05% sehingga dianjurkan memakai *Fixed Effects* begitu juga jika dilihat dari hasil *uji Hausman* pada model pertumbuhan nilai probabilitas lebih besar dari 0.05% yang artinya tidak signifikan sehingga dianjurkan memakai *Random Effects*, namun jika dilihat dari R^2 nilai yang lebih mendekati angka 1 adalah dengan menggunakan model *Fixed Effects*. Sedangkan dari perhitungan melalui *uji chow* pada model kemiskinan dapat dilihat nilai probabilitas nya lebih kecil dari 0.05% sehingga dianjurkan memakai *Fixed Effects* begitu juga pada *uji Hausman* probabilitas lebih kecil dari 0.05% karena signifikan sehingga dianjurkan memakai *Fixed Effects* dan boleh menolak *Random Effects* dan jika dilihat dari R^2 nilai yang lebih mendekati angka 1 adalah dengan menggunakan model *Fixed Effects*.

Setelah dilakukan pengujian dengan dua cara tersebut, hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa pendekatan *Fixed Effect Model* (FEM) merupakan model yang terbaik untuk menganalisis penelitian ini.

Pengaruh Efisiensi Sektor Publik terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Setelah diperoleh model pendekatan yang tepat, selanjutnya dilakukan analisis pengaruh efisiensi sektor publik di bidang pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur terhadap pertumbuhan ekonomi. Pengujian dilakukan dengan menggunakan aplikasih eviews dan diperoleh data pada tabel 3

Tabel 3: **Hasil Regresi Data dengan Metode FEM pada Model Pertumbuhan Ekonomi**

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	7.516674	1.058026	7.104432	0.0000
PEND?	0.927918	0.302215	3.070392	0.0041
KES?	-1.710806	1.547097	-1.105817	0.2763
INFR?	-0.267498	0.722307	-0.370338	0.7134
R-squared	0.597285	Mean dependent var		6.664737
Adjusted R-squared	0.137038	S.D. dependent var		0.777028
S.E. of regression	0.721826	Akaike info criterion		2.489496
Sum squared resid	18.23612	Schwarz criterion		3.746865
Log likelihood	-53.60083	Hannan-Quinn criter.		2.992001
F-statistic	1.297750	Durbin-Watson stat		3.897436
Prob(F-statistic)	0.217615			

Sumber: Hasil Perhitungan Eviews

Berdasarkan hasil regresi panel pada variabel pertumbuhan diatas dapat dijelaskan sebagai berikut:

Uji R-square

Tabel 3 menunjukkan bahwa nilai koefisien determinasi (R-square) sebesar 0.597285 atau 59%, yang berarti model ini mendekati 100%. Hasil ini bisa menjelaskan seberapa besar pengaruh pendidikan (X1), kesehatan (X2), infrastruktur (X3) terhadap pertumbuhan (Y). Hasil diatas menjelaskan bahwa 59.72% variasi dari pertumbuhan

ekonomi dapat dijelaskan dengan variabel pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur, sedangkan sisahnya variasi pertumbuhan ekonomi dijelaskan oleh faktor lain yang tidak disebutkan dalam model regresi ini.

Uji t

Uji t dilakukan untuk menjelaskan pengaruh secara individu/parsial dari variabel pendidikan (X_1), kesehatan (X_2), dan infrastruktur (X_3) terhadap pertumbuhan (Y). dari data pada tabel 3 dengan signifikansi 0.05 (10%), maka konstanta C memperoleh nilai signifikansi 0.0000 yang lebih kecil dari 0.05, maka disimpulkan bahwa konstanta berpengaruh signifikan terhadap model regresi. Selanjutnya variabel independen pendidikan menunjukkan nilai signifikansi 0.0041 yang lebih kecil dari 0.05, maka disimpulkan bahwa efisiensi pendidikan berpengaruh signifikan terhadap model regresi. Kesehatan menunjukkan nilai signifikansi 0.2763 yang lebih besar dari 0.05, maka kesehatan tidak berpengaruh signifikan terhadap model regresi. Sedangkan infrastruktur menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0.7134 yang lebih besar dari 0.05 maka disimpulkan bahwa efisiensi infrastruktur tidak berpengaruh signifikan secara parsial terhadap model regresi.

Uji F

Uji F dilakukan sebagai pengujian serentak/simultan, dimana pada tabel 3 diperoleh hasil F-statistik sebesar 1.297750 dengan nilai signifikan 0.217615 Nilai probabilitas 0.217615 yang lebih besar dari 0.05 sehingga model regresi tidak dapat digunakan untuk memprediksi pertumbuhan atau pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur secara serentak (simultan) berpengaruh terhadap pertumbuhan.

Seperti yang dijelaskan pada bab sebelumnya, pengeluaran pemerintah atas pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur pada dasarnya merupakan suatu investasi pemerintah untuk mencapai pertumbuhan ekonomi dan kehidupan masyarakat yang berkualitas. namun hasil penelitian yang telah dilakukan dengan metode regresi data panel menunjukkan bahwa efisiensi sektor publik dibidang pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur secara langsung tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Namun secara tidak langsung efisiensi sektor publik dapat berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi daerah melalui produktivitas, jika pengeluaran pemerintah produktif maka investasi akan meningkat sehingga akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah.

Efisiensi sektor infrastruktur disini secara tidak langsung berdampak terhadap penurunan pertumbuhan ekonomi karena wilayah yang paling tidak efisien dalam melakukan pembelanjaan infrastruktur paling banyak jika dibandingkan dengan sektor pendidikan maupun kesehatan. Dari 38 wilayah terdapat 35 wilayah yang tidak efisien dalam melakukan pembelanjannya seperti yang telah dibahas sebelumnya. Kurangnya pengeluaran terhadap infrastruktur membuat dengan sendirinya cakupan dan mutu pelayanan infrastruktur menjadi rendah. Contoh nyata dalam hal ini bisa dilihat dari data kualitas jalan yang baik. Dimana kualitas jalan ini sangat rendah karena kurangnya pemeliharaan. Sehingga kejadian ini akan menghambat pertumbuhan ekonomi.

Hasil ini sependapat dengan penelitian yang dilakukan oleh Fan, et.all (2004). Hasil penelitian yang dilakukan oleh fan menunjukkan bahwa investasi pemerintah pada sektor pertanian, pendidikan, dan infrastruktur memiliki pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi dan penurunan kemiskinan. Fan mengatakan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi dan pengurangan tingkat kemiskinan pemerintah perlu memberikan prioritas terhadap sektor pertanian, pendidikan, dan jalan infrastruktur.

Hal yang serupa dikatakan oleh Greiner (2006) mengatakan bahwa tidak ada pertumbuhan ekonomi saat investasi pemerintah tidak optimal. Untuk itu investasi pada pembangunan modal manusia akan dapat mendukung pertumbuhan ekonomi jika dilakukan dengan efektif dan efisien. Penjelasan tersebut menunjukkan bahwa bila upaya yang dilakukan pemerintah dalam penyediaan pelayanan pendidikan, kesehatan dan infrastruktur tidak efisien maka upaya tersebut tidak akan mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kualitas hidup masyarakat.

Pelayanan kesehatan yang tidak efisien disebabkan oleh kurangnya jumlah puskesmas atau kurangnya tenaga medis dan paramedis dapat menyebabkan penurunan kesejahteraan masyarakat. Kebutuhan akan kesehatan jika tidak terpenuhi akan berpengaruh terhadap kinerja masyarakat sehingga dapat mengurangi produktivitasnya dalam bekerja. Produktivitas yang terus menurun pada akhirnya juga akan mengurangi pendapatan masyarakat dan meningkatkan pengangguran. Begitu juga dari sisi infrastruktur, kurangnya jalan yang baik akan menghambat perekonomian suatu daerah. Dengan melakukan perbaikan terhadap pengeluaran sektor publik dan memberikan prioritas terhadap sektor yang produktif seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur jalan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan penurunan tingkat kemiskinan.

Berbeda dengan efisiensi pendidikan, yang mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi dikarenakan pengeluaran pendidikan yang meningkat tajam dimulai dari tahun 2010. Pengeluaran yang dilakukan pemerintah pada tahun 2010 sampai 2012 sangat besar sehingga akan mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Dimana pelayanan pendidikan efisien akan berdampak pada kemampuan atau kualitas suatu masyarakat. Pendidikan dan keterampilan yang tinggi akan dibutuhkan oleh pihak badan usaha karena dengan pendidikan dan keterampilan

yang tinggi akan meningkatkan produktifitas kerja dan hasil produksi. Hal ini jelas akan membuat pendapatan masyarakat didaerah tersebut menjadi tinggi dan tingkat pengangguran menjadi semakin berkurang sehingga akan menurunkan kemiskinanpun.

Pengaruh Efisiensi Sektor Publik terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Untuk mengetahui pengaruh efisiensi sektor publik di bidang pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur terhadap kemiskinan dilakukan Pengujian dengan menggunakan aplikasih eviews dan diperoleh data pada tabel 4 dibaah ini:

Tabel 4: **Hasil Regresi Data dengan Metode FEM pada Model Kemiskinan**

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	19.42820	1.450015	13.39862	0.0000
PEND?	-1.517758	0.414182	-3.664468	0.0008
KES?	-7.734396	2.120281	-3.647816	0.0009
INFR?	-0.492055	0.989915	-0.497068	0.6222
R-squared	0.986230	Mean dependent var		13.83092
Adjusted R-squared	0.970492	S.D. dependent var		5.758904
S.E. of regression	0.989255	Akaike info criterion		3.119833
Sum squared resid	34.25189	Schwarz criterion		4.377202
Log likelihood	-77.55365	Hannan-Quinn criter.		3.622339
F-statistic	62.66752	Durbin-Watson stat		3.897436
Prob(F-statistic)	0.000000			

Sumber: Hasil Perhitungan Eviews

Berdasarkan hasil regresi panel pada variabel pertumbuhan diatas dapat dijelaskan sebagai berikut:

Uji R-square

Tabel 4 menunjukkan bahwa nilai koefisien determinasi (R-square) sebesar 0.986230 atau 98%, yang berarti model ini mendekati 100%. Hasil ini bisa menjelaskan seberapa besar pengaruh pendidikan (X₁), kesehatan (X₂), infrastruktur (X₃) terhadap kemiskinan (Y). hasil diatas menjelaskan bahwa 98.62% variasi dari kemiskinan dapat dijelaskan dengan variabel pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur, sedangkan sisahnya variasi kemiskinan dijelaskan oleh faktor lain yang tidak disebutkan dalam model regresi ini.

Uji t

Uji t dilakukan untuk menjelaskan pengaruh secara individu/parsial dari variabel pendidikan (X₁), kesehatan (X₂), dan infrastruktur (X₃) terhadap kemiskinan (Y). dari data pada tabel 4 dengan signifikasi 0.05 (10%), maka konstanta C memperoleh nilai signifikasi 0.0000 yang lebih kecil dari 0.05, maka disimpulkan bahwa konstanta berpengaruh signifikan terhadap model regresi. Selanjutnya variabel independen pendidikan menunjukkan nilai signifikasi 0.0008, dan variabel kesehatan menunjukkan nilai signifikasi 0.0009 yang lebih kecil dari 0.05. Sedangkan variabel infrastruktur menunjukkan nilai signifikasi sebesar 0.6222 yang lebih besar dari 0.05, sehingga infrastruktur tidak berpengaruh signifikan secara parsial terhadap kemiskinan.

Uji F

Uji F dilakukan sebagai pengujian serentak/simultan, dimana pada tabel 4 diperoleh hasil F-statistik sebesar 62.66752 dengan nilai signifikan 0.000000. Nilai probabilitas 0.000000 yang jauh lebih kecil dari 0.05 sehingga model regresi dapat digunakan untuk memprediksi kemiskinan atau pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur secara serentak (simultan) berpengaruh terhadap kemiskinan.

Seperti yang dijelaskan pada bab sebelumnya, pengeluaran pemerintah atas pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur pada dasarnya berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi dan penurunan kemiskinan, dengan melakukan investasi pendidikan akan mampu meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang diperlihatkan dengan meningkatnya pengetahuan dan keterampilan seseorang. Semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang, maka pengetahuan dan keahlian juga akan meningkat sehingga akan mendorong peningkatan produktivitas kerjanya.

Tidak hanya pendidikan yang merupakan determinan penting dalam tingkat kemiskinan, namun kesehatan juga merupakan determinan penting dalam tingkat kemiskinan. Kesehatan masyarakat yang cenderung baik akan berdampak pada produktivitas dan etos kerja yang meningkat pula, alhasil pendapatan yang dihasilkan meningkat

seiring dengan perbaikan kesehatan di masyarakat. Pendapatan baik secara individu maupun agregat akan bertambah. Pendapatan yang meningkat akan mengangkat derajat seseorang untuk keluar dari kemiskinan.

Begitu juga dengan belanja di bidang infrastruktur, perbaikan infrastruktur akan meningkatkan penyerapan tenaga kerja, memicu investasi dan peningkatan pendapatan masyarakat. Infrastruktur yang baik juga merangsang peningkatan pendapatan masyarakat. Aktivitas ekonomi yang semakin meningkatkan mendorong mobilitas faktor produksi dan aktivitas perdagangan. Pada akhirnya perbaikan infrastruktur ini akan mempercepat pembangunan ekonomi. Meningkatnya kondisi pembangunan akan memberikan efek peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pengentasan kemiskinan.

Namun hasil yang diperoleh dari penelitian ini variabel infrastruktur secara langsung tidak berpengaruh terhadap kemiskinan namun secara tidak langsung variabel infrastruktur berpengaruh terhadap penurunan kemiskinan. Berbeda halnya dengan variabel pendidikan dan kesehatan yang berpengaruh negative signifikan terhadap kemiskinan. Efisiensi pada sektor pendidikan disini mampu menurunkan kemiskinan karena efisiensi pendidikan yang tampak dari hasil tingkat efisiensi sektor pendidikan yang score efisiensinya dari tahun 2008 ke tahun 2012 telah mengalami peningkatan, dan dilihat dari pengeluaran pemerintah yang di prioritaskan pada pengeluaran pendidikan yang sangat besar sehingga dapat menurunkan kemiskinan yang ada di Kabupaten/Kota Jawa Timur. Dimana jika pelayanan pendidikan tinggi maka akan berdampak pada kualitas suatu masyarakat. Sedangkan kualitas dan keterampilan yang tinggi dibutuhkan oleh pihak badan usaha karena dengan pendidikan dan keterampilan yang tinggi akan meningkatkan produktivitas dan hasil produksi. Pendapatan yang didapat masyarakat meningkat yang akan mengurangi pengangguran, sehingga kemiskinanpun akan berkurang.

Begitu juga dengan efisiensi kesehatan yang mampu menurunkan kemiskinan karena jika dilihat dari hasil efisiensi, kesehatan memiliki tingkat efisiensi yang lebih tinggi dari pendidikan dan infrastruktur. Sehingga kesehatan mampu menurunkan kemiskinan. Karena ketika kesehatan masyarakat cenderung baik maka akan berdampak pada produktivitas dan etos kerja yang meningkat. Sehingga pendapatan masyarakat akan tinggi. Dimana pendapatan yang tinggi akan mengangkat derajat seseorang untuk keluar dari kemiskinan.

Begitu juga dengan efisiensi infrastruktur disini tidak berpengaruh secara langsung terhadap kemiskinan namun secara tidak langsung efisiensi infrastruktur berpengaruh dan mampu menurunkan kemiskinan. Tingkat efisiensi infrastruktur yang rendah disebabkan karena kurangnya kualitas jalan raya yang baik akan menghambat perekonomian suatu daerah, sehingga akan menurunkan kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan kemiskinan. Hal ini sesuai dengan penelitian Mehmood dan Sadiq (2010) yang mengemukakan bahwa pengeluaran pemerintah dan kemiskinan memiliki hubungan negatif jika pengeluaran tersebut adalah jalur pembangunan seperti pembangunan fasilitas sosial, barang publik, infrastruktur, biaya modal tambahan, kesehatan dan pendidikan. Hasil yang senada di katakana oleh Nurdyana S, Budiono, dan Fahmi (2012) mengatakan bahwa Pengaruh tingkat pendidikan terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Maluku Utara adalah negatif dan signifikan pada level 1%.

E. PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dilakukan sebelumnya maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Kinerja pemerintah daerah di Jawa Timur dalam melaksanakan pengeluaran sektor publik sebagian besar tidak efisien. Input yang berlebihan dan output yang tidak optimal menjadi penyebab ketidak efisienan sehingga sumberdaya atau input yang digunakan tersebut menjadi tidak efisien.
2. Efisiensi kesehatan dan infrastruktur pada pengeluaran sektor publik di Jawa Timur secara langsung tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Hal ini dikarenakan pelayanan kesehatan yang tidak efisien Karen disebabkan oleh kurangnya jumlah puskesmas dan tenaga kerja puskesmas akan berdampak pada kemampuan atau kualitas suatu masyarakat. Begitu juga dengan kurangnya pengeluaran terhadap infrastruktur membuat dengan sendirinya cakupan dan mutu pelayanan infrastruktur menjadi rendah sehingga akan menghambat pertumbuhan ekonomi.
3. Efisiensi pendidikan dan kesehatan pada pengeluaran sektor publik di Jawa Timur berpengaruh terhadap penurunan kemiskinan. Namun untuk efisiensi infrastruktur pada pengeluaran sektor publik di Jawa Timur secara langsung tidak berpengaruh terhadap kemiskinan namun secara tidak langsung efisiensi infrastruktur mampu menurunkan kemiskinan yang ada di Jawa Timur.

Saran

Dari hasil penelitian yang diperoleh, maka ada beberapa saran yang perlu di pertimbangkan oleh pihak-pihak yang berkaitan atau berkepentingan antara lain yaitu:

1. Bagi pemerintah daerah yang belum mencapai tingkat efisiensi perlu melakukan perbaikan atau *improvement* pada input maupun outputnya. Dari sisi input, disarankan pengeluaran yang dilakukan lebih hati-hati agar tidak terjadi pemborosan ataupun inefisiensi. Sedangkan dari sisi output, perbaikan dapat dilakukan dengan cara menambah jumlah output demi mencapai efisiensi. Hal ini ditujukan terutama pada wilayah- wilayah yang tingkat efisiensinya sangat rendah. Pemerintah pada wilayah-wilayah yang tidak efisien dapat menggunakan wilayah-wilayah yang efisien sebagai *benchmark* atau acuan dalam melakukan perbaikan. Sedangkan untuk pemerintah wilayah yang telah efisien dalam melakukan pengeluaran publik nya, diharapkan dapat mempertahankan tingkat efisiensinya dengan memperhatikan alokasi input dan output yang diperoleh.
2. Pemerintah perlu mengoptimalkan kinerjanya dalam melakukan belanja pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur untuk mendukung kesejahteraan masyarakat. Dengan melakukan perbaikan terhadap efisiensi sektor publik dan memberikan prioritas terhadap sektor yang produktif seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur jalan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dan penurunan tingkat kemiskinan. Kebijakan yang dapat dilakukan diantaranya dengan menggunakan wewenangnya untuk mengalokasikan anggarannya dengan lebih cermat, efektif dan efisien. Pemerintah daerah diharapkan dapat sedemikian rupa agar tidak terjadi penyalagunaan wewenang dalam rangka menggunakan dana untuk belanja pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur.
3. Pemerintah dalam mengatasi masalah kemiskinan di Provinsi Jawa Timur hendaknya pemerintah daerah Provinsi Jawa Timur lebih meningkatkan program pembangunan yang menitik beratkan pada bidang kesehatan, pendidikan dan infrastruktur. Salah satunya dengan melakukan pengeluarannya untuk perawatan pada fasilitas sektor publik seperti gedung sekolah, gedung rumah sakit, dan kualitas jalan sehingga tidak menunggu kerusakan yang terlalu parah baru melakukan perbaikan karena itu akan lebih membutuhkan pengeluaran yang lebih banyak.

UCAPAN TERIMAKASIH

Kami mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah membantu sehingga panduan ini dapat terselesaikan. Ucapan terima kasih khusus kami sampaikan kepada Prof. Candra Fajri Ananda, SE., M.Sc., Ph.D. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya dan Bapak Ferry Prasetya, SE., M. APP. Ec. Int selaku Dosen Pembimbing yang memungkinkan jurnal ini bisa diterbitkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Afonso, António and Aubyn, St, Miguel. 2004. Non-parametric Approaches to Education and Health Expenditure Efficiency in OECD Countries. *JEL: I18, I21, I28, H51, H52, C14*
- Ajjah, Shorchrul R, Dyah W. Sari, Rahmt H. Setianto dan Martha R. Primanti. 2011. *Cara Cerdas menguasai Eviews*. Jakarta: Selemba Empat
- Aristovnik, Aleksander. 2013. Relative Efficiency of Education Expenditures in Eastern Europe: A Non-parametric Approach. *Journal of Knowledge Management, Economics and Information Technology*
- Arsyad, Lincolin. 1999. *Ekonomi Pembangunan*. Edisi Keempat. Yogyakarta: STIE YKPN
- BPS Jawa Timur. 2008. Data dan Informasi Kemiskinan Kabupaten/Kota 2008.

- BPS Jawa Timur. 2012. Data dan Informasi Kemiskinan Kabupaten/Kota 2012.
- BPS Jawa Timur. 2008. Provinsi Jawa Timur Dalam Angka. Jawa Timur Province In Figure 2008
- BPS Jawa Timur. 2012. Provinsi Jawa Timur Dalam Angka. Jawa Timur Province In Figure 2012
- BPS Jawa Timur. 2008. Statistik Perhubungan Jawa Timur 2008
- BPS Jawa Timur. 2012. Statistik Perhubungan Jawa Timur 2012
- Barro, Robert J. 1990. Government Spending in a Simple Model of Endogenous Growth. *Journal of Political Economy* 98 (5), 103-125
- Batare, Svetlana. 2012. Efficiency Of Public Spending On Education. *Viesoji Politika Ir Administravimas Public Policy And Administration*
- Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. 2008. Realisasi Pengeluaran Pemerintah Berdasarkan Fungsi Tahun 2008. <http://www.djpk.depkeu.go.id>. Diakses pada 2 juni 2014
- Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. 2012. Realisasi Pengeluaran Pemerintah Berdasarkan Fungsi Tahun 2012. <http://www.djpk.depkeu.go.id>. Diakses pada 2 juni 2014
- Fan, Shengge, Huong, Pham Lan & Long, Trinh Quang. 2004. Government Spending and Poverty in Vietnam. *American Journal of Agricultural Economics*
- Gee Chan, Sok And Abd Karim, Mohd Zaini. 2012. Public Spending Efficiency And Political And Economic Factors : Evidence From Selected East Asian Countries. *Economic Annals, Vol. Lvii, No. 193*
- Grossman, P.J. 1988. Government and Economic Growth. A non-linear Relationship. *public Choice, Vol. 56, 193-200*
- Greiner, Alfred. 2006. Human Capital formation, Public Debt, and Economic Growth. *Department of Business Administration and Economics, Bielefeld University*
- Gujarati, Damodar N., Porter, Dawn C. 2012. *Dasar-dasar Ekonometrika. Basic Econometrics*. Buku 2/Edisi 5. Jakarta: Penerbit Salemba Empat
- Hadi Utomo, Sugeng dan Sumarsono, Hadi. 2009. Dampak Kebijakan Desentralisasi Fiskal terhadap Efisiensi Sektor Publik dan Pertumbuhan Ekonomi di Jawa Timur. *JESP, Vol. 1, No. 2, 89-98*
- Jafarov, Etibar dan Gunnarsson, Victoria. 2008. Government Spending on Health Care and Education in Croatia: Efficiency and Reform Option. *IMF Worrking Paper*
- Mankiw, N.,Gregory. 2006. *Makro Ekonomi*. Edisi keenam. Jakarta: Erlangga
- Mehmood, Rashid. Sadiq, Sara. 2010. The Relationship between Government Expenditure and Poverty: A Cointegration Analysis. *Romanian Journal of Fiscal Policy. Vol. 1, Issue 1, Pages 29-37*
- Nachrowi, D. 2006. *Ekonometrika: Untuk Analisis Ekonomi dan Keuangan*. Jakarta: LPFE Universitas Indonesia.
- Nurdyana.S. Harry, Budiono, Fahmi Mohamad. 2012. Pendidikan Dan Kemiskinan Studi Kasus Provinsi Maluku Utara. *Departemen Ilmu Ekonomi Universitas Padjadjaran*
- Oates, W. 1993. *Fiscal Decentralization and Economic Development. National Tax Journal XLVI, 237-243.*

- Ramayadi, Arif. 2003. Economic Growth and Government size in Indonesia: Some Lesson for The Local Authorities. *Working Paper in Economics and Development Studies*
- Rasyid, M. Ryaas. 2005. *Desentralisasi dan Otonomi Daerah*, Editor: Syamsudin Haris, Lembaga Pengetahuan Indonesia, Jakarta.
- Saleh, Samsubar. 2002. Faktor-Faktor Penentu Tingkat Kemiskinan Regional Di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, h. 87-102, vol.7, No.2
- Sasana, Hadi. 2009. Peran Desentralisasi Fiskal terhadap Kinerja Ekonomi di Kabupaten/Kota Propinsi Jawa Tengah. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, Vol. 10, No. 1, 103-124.
- Scully, Gerald. W. 2010. Government Expenditure and Quality of Life. *Public Choice*. Springer.
- Simanjuntak, Robert A. 2005. *Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah dalam Pasang Surut Otonomi Daerah: Sketsa Perjalanan 100 Tahun*, Editor: Anhar Ganggang, Yayasan Tifa, Jakarta.
- Siregar, Hermanto. Wahyuniarti,Dwi. 2008. Menganalisis dampak Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Jumlah Penduduk Miskin di Indonesia
- Sitepu, Rasidin K. Bonar M Sinaga. 2005. Dampak investasi Sumberdaya Manusia terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Kemiskinan di Indonesia: Pendekatan Model Computable General Equilibrium. *Jurnal Ekonomi*. IPB.
- Tanzi, Vito. 2002. The Proceedings of a 2000 International Conference on Managing Fiscal Decentralization.
- Todaro, Michael P. dan Stephen C. Smith 2006. *Ekonomi Pembangunan*, Edisi ke-sembilan, Jakarta: Erlangga.
- Ventelou. B. Bry. X. 2005. The Role Of Public Spending in Economic Growth Envelopment Methods. *Elseiver*.